

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) meneliti faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan akuntansi dengan variabel bebas keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri akuntansi, moralitas manajemen, serta variabel terikat perilaku etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan terbuka dan BUMN di seluruh Indonesia dengan metode pengambilan sampel adalah *stratified random sampling*, yaitu mengelompokkan perusahaan berdasarkan Sembilan sektor usaha. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (Jensen and Meckling, 1976).

Penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal, ketaatan terhadap aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas manajemen berpengaruh positif terhadap perilaku tidak etis, jadi semakin besar pengendalian internal, ketaatan terhadap aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas manajemen semakin rendah perilaku tidak etis manajemen perusahaan. Sedangkan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis, bahwa pemberian kompensasi berupa uang/gaji dan promosi tidak akan menurunkan perilaku tidak etis perusahaan. Pada faktor yang kedua yaitu pengendalian internal, ketaatan terhadap aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, jadi semakin besar

pengendalian internal, ketaatan terhadap aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas manajemen semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi oleh manajemen perusahaan. Sedangkan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh pada kecenderungan kecurangan akuntansi, bahwa pemberian kompensasi berupa uang/gaji dan promosi tidak akan menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi oleh manajemen perusahaan.

Prawira, dkk (2014) tujuan penelitian untuk menganalisis moralitas individu, asimetri informasi dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten Buleleng. Variabel independen dari penelitian ini adalah moralitas individu, asimetri informasi dan efektivitas pengendalian internal. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan penelitian kuantitatif dengan bantuan program SPSS versi 19 dengan uji non parametik.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu, asimetri informasi dan keefektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi, apabila moralitas individu, asimetri informasi dan keefektivitas pengendalian internal semakin meningkat bisa menurunkan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada BUMD kabupaten Buleleng.

Penelitian yang dilakukan oleh Artini, dkk (2014) tujuan penelitian untuk menguji menganalisis pengaruh pengaruh budaya etis organisasi dan efektivitas

pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di daerah Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) kabupaten Jembrana. Variabel independen dari penelitian ini adalah pengaruh budaya etis organisasi dan efektivitas pengendalian internal. Sedangkan variabel dependennya kecenderungan kecurangan akuntansi. Jenis penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan program SPSS 19, teknik sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya etis organisasi dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan diterapkannya suatu budaya etis dalam organisasi maka akan mendorong seseorang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang beretika sehingga kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dihindarkan. Sedangkan semakin tinggi efektivitas pengendalian internal suatu organisasi akan dapat menurunkan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD kabupaten Jembrana.

Pada penelitian Najahnigrum (2103) dengan tujuan untuk menguji penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di Pegawai Dinas provinsi Yogyakarta. Variabel independen dari penelitian ini penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, budaya etis organisasi. Sedangkan variabel dependennya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi dan *Fraud Triangle Theory*. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, metode yang digunakan adalah analisis *Structural Equation Modelling (SEM)* dengan alat analisis *Smart PLS 2.0*. Hasil penelitiannya bahwa penegakan peraturan, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, budaya etis organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Sedangkan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Jadi semakin tinggi penegakan peraturan, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, budaya etis organisasi dan pengendalian internal dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Tetapi bila asimetri informasi semakin tinggi dapat membuka peluang terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (Jensen and Meckling, 1976) dalam Wilopo (2006), Prawira (2014) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah problem yang muncul bila a) keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan, dan b) bila prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Bila agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki

kenginan dan motivasi yang berbeda, maka agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (pemegang saham). Keinginan, motivasi dan utilitas yang tidak sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham, antara lain berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi. Jensen and Meckling (1976), Brickley and James (1987), dan Shivdasani (1993) dalam Willopo (2006), Prawira (2014) menjelaskan bahwa prinsipal dapat memecahkan permasalahan ini dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada agen, serta mengeluarkan biaya monitoring.

2.2.2 Fraud Triangle Theory

Fraud Triangle Theory merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Donald R. Cressey (1953) dalam Najahningrum (2013) yang dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi: peluang/kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*), rasionalisasi (*rationalization*).

2.2.2.1 Pressure (Tekanan)

Yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan.

Tekanan merupakan faktor yang berasal dari kondisi individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan dari dalam diri

seseorang tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat bekerja. Salah satu, faktor lingkungan yang dapat menyebabkan tekanan pada seorang pegawai akuntan adalah moralitas individu seseorang dan ketaatan terhadap aturan perusahaan.

2.2.2.2 Opportunity (Peluang)

Yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh kontrol yang lemah, ketidaksiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak adanya mekanisme audit, dan sikap apatis. Hal yang paling menonjol disini adalah dalam hal kontrol. Kontrol yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan.

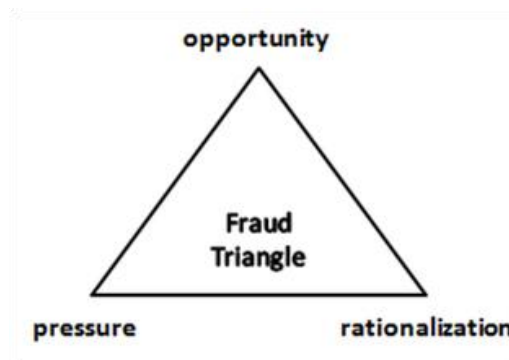
Kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan kecurangan. Kondisi tersebut sebenarnya dapat dikendalikan oleh perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi tersebut dalam lingkup entitas perusahaan antara lain asimetri informasi.

2.2.2.3 Rationalization (Rasionalisasi)

Yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*. Rasionalisasi mengacu pada *fraud* yang bersifat situasional. Menurut Salman (2005) dalam Fitriyah (2010) pelaku akan mengatakan: “*I’m only borrowing the money; I’ll pay it back*”, “*Everyone does it*”, “*I’m not hurting anyone*”, “*It’s for a good purpose*”, and “*It’s not that*

serious". Sikap dan perilaku rasionalisasi bisa juga akan melahirkan perilaku serakah.

Dalam perkembangan selanjutnya hipotesis ini dikenal sebagai *fraud triangle* atau segitiga kecurangan seperti dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Fraud Triangle

2.2.3 Definisi Kecurangan

Kecurangan (*fraud*) menurut Zulkarnain (2013) adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Menurut Adelin (2009), pelaku kecurangan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu manajemen dan karyawan atau pegawai. Pihak manajemen melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan dan karyawan melakukan kecurangan untuk keuntungan individu.

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan bentuk penipuan atau kejahatan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan memberi keuntungan bagi dirinya sendiri dibidang keuangan atau non keuangan.

2.2.4 Definisi Kecurangan Akuntansi

Kecurangan akuntansi menimbulkan kerugian yang sangat besar di hampir seluruh industri. Kerugian dari kecurangan akuntansi di pasar modal adalah menurunnya akuntabilitas manajemen sehingga membuat para pemegang saham meningkatkan biaya monitoring terhadap manajemen (Zulkarnain, 2013).

Menurut Wilopo (2006), umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan ini merupakan bentuk kecurangan akuntansi.

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kecurangan akuntansi adalah alat seseorang individual untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian pelaporan keuangan yang palsu sehingga merugikan keuangan perusahaan atau keuangan Negara.

2.2.5 Definisi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA)

Kusumastuti (2012), menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih dalam dunia usaha di antaranya berbentuk salah saji atas laporan keuangan, manipulasi di pasar

modal, penyuapan komersial, penyuapan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan.

Definisi *fraud* juga diungkapkan menurut *the Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Kurniawati (2012): “Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain”.

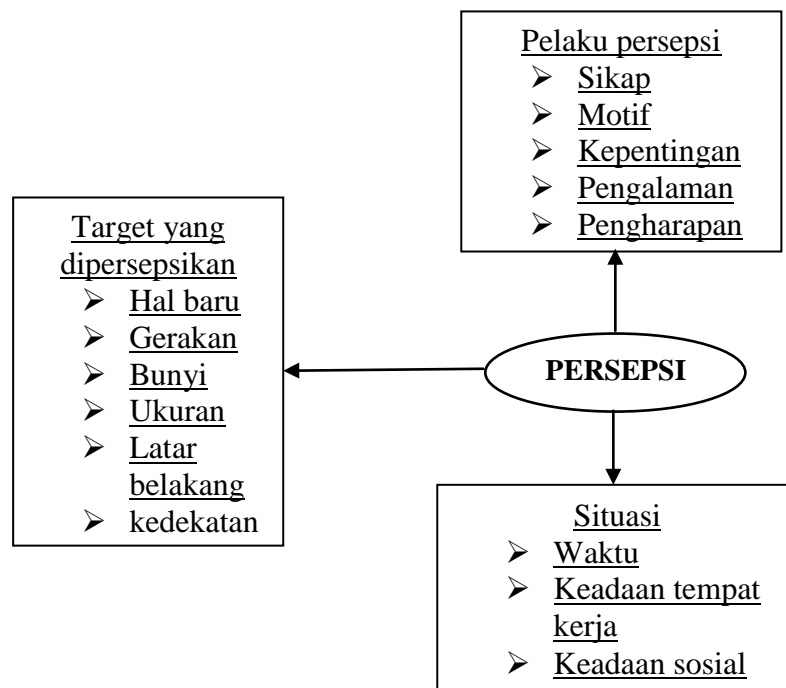
Berdasarkan kedua definisi tersebut kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diartikan sebagai adanya tindakan, cara, kelicikan, dan penyembuyian yang tidak semestinya secara sengaja, yaitu dalam menyajikan laporan keuangan dan pengelolaan aset organisasi yang mengarah pada tujuan mencapai keuntungan dirinya sendiri dan merugikan pihak orang lain.

2.2.6 Persepsi

Menurut Ikhsan dan Ishak (2005) dalam Najahningrum (2013) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, obyek serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Pada kenyataannya, masing-masing orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Uraian kenyataan seseorang mungkin jauh berbeda dengan uraian orang lain. Definisi persepsi yang formal adalah proses dengan mana seseorang

memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti.

Menurut Robbins (2005) dalam Sukanto (2007), apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif. Persepsi berhubungan dengan sikap. Sikap adalah sebuah pernyataan evaluasi baik positif maupun negatif mengenai obyek, orang atau peristiwa. Komponen dari sikap adalah *cognition*, *affect*, dan *behavior*. Dari ketiga komponen tersebut, komponen yang berkaitan dengan persepsi adalah komponen *cognition* dan *affect*. Komponen kognitif merupakan segmen pendapat atau keyakinan, sedangkan afeksi merupakan segmen perasaan atau emosional. Persepsi seseorang dipengaruhi oleh pelaku persepsi, target yang dipersepsikan, dan situasi.



Sumber: Robbins (2005) dalam Sukanto (2007)

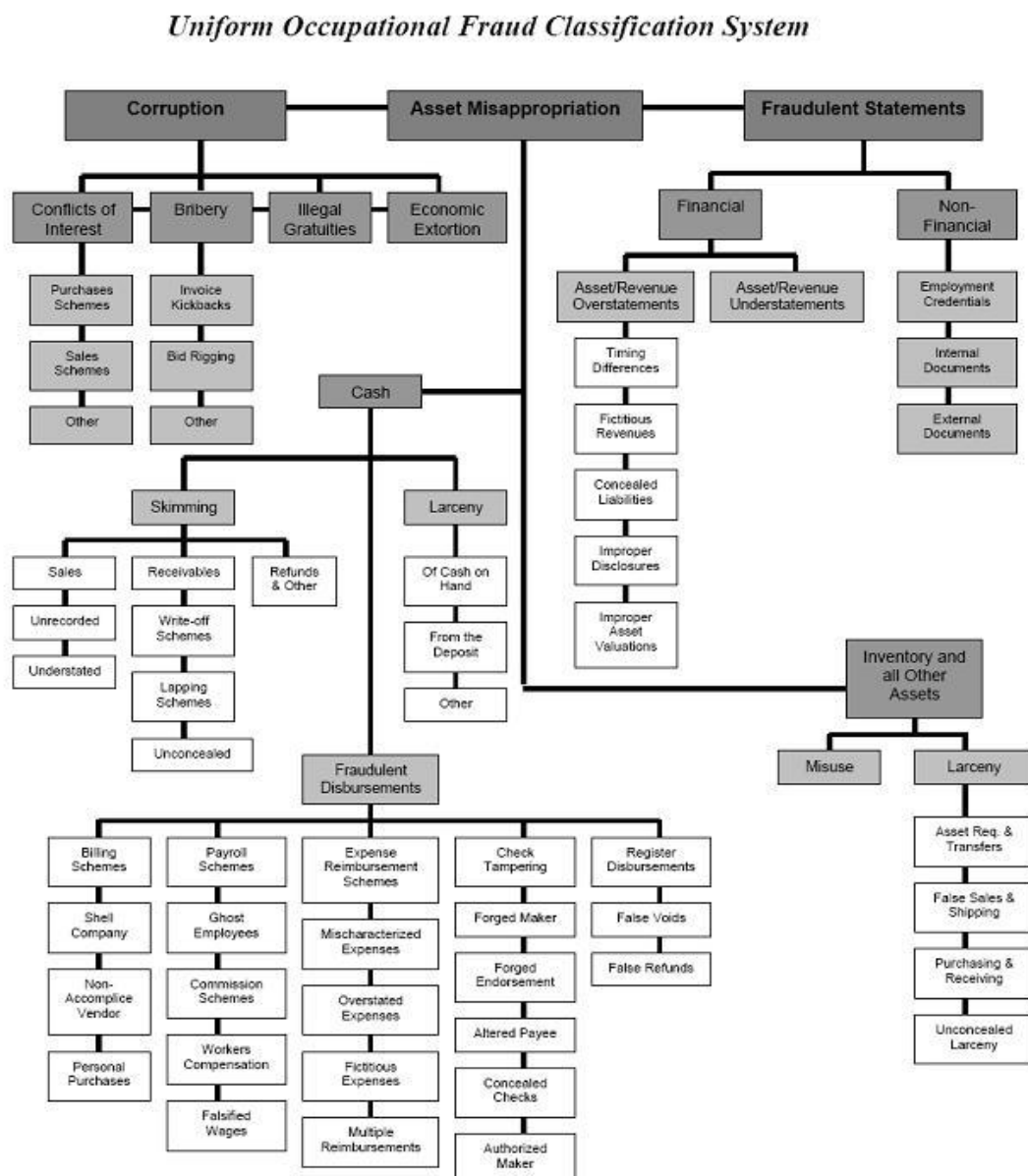
Gambar 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Orang-orang merasakan dunia ini dengan cara yang berbeda karena persepsi bergantung pada rangsangan fisik dan kecenderungan individu tersebut. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan, seperti penglihatan dan sentuhan. Kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. Perbedaan persepsi antara orang-orang disebabkan karena perasaan individu yang menerimanya berbeda fungsi dan hal ini terutama sekali disebabkan oleh kecenderungan perbedaan. Oleh karena itu, kebijakan perusahaan yang sama saja bisa dirasakan berbeda oleh para pekerja produksi, para manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat puncak. Faktor lain yang berhubungan dengan kecenderungan individu adalah keakraban, perasaan, arti penting, dan emosi. Orang-orang biasanya merasa obyek umum lebih cepat dikenal dibandingkan dengan orang-orang atau obyek yang tidak familiar.

Kecenderungan perasaan masyarakat terhadap suatu obyek atau orang juga mempengaruhi persepsi. Terdapat kecenderungan orang-orang untuk mencari informasi lebih tentang obyek yang tujuannya adalah untuk menjaga agar mereka tidak merasakan hal-hal yang negatif. Status emosional seseorang dapat memengaruhi persepsi. Persepsi dapat berbeda tergantung apakah orang tersebut merasakan kenikmatan dan keselamatan setiap hari atau justru merasa bahwa hari-hari yang tidak baik, apakah orang tersebut merasa tertekan atau gembira dan seterusnya (Ikhsan dan Ishak,2005).

2.2.7 Jenis dan Pelaku Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA)

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) juga mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah "Fraud Tree".



Sumber: *the Association of certified fraud examiners (ACFE)* dalam Najahningrum

Gambar 2.3
Fraud Tree

Berdasarkan bagan tersebut, *fraud* diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan jenis perbuatannya antara lain *Corruption*, *Asset Missappropriation*, dan *Fraudulent Statements*.

1. *Corruption* (Korupsi)

Jenis *fraud* ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Cabang dan ranting yang menggambarkan fraud yang diberi label “*corruption*” dapat dilihat di sisi kiri dari *fraud tree*. Istilah korupsi menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 meliputi 30 tindak pidana korupsi dan bukan empat bentuk seperti yang digambarkan dalam ranting-ranting : *conflict of interest*, *bribery*, *ilegal gratuities*, dan *economic extortion*.

Bila korupsi diperusahaan tersebut sudah menjadi budaya etis organisasi perusahaan, maka para akuntan harus mempunyai moral individu yang baik agar terhindar dari sifat korupsi. Para akuntan juga harus taat terhadap aturan akuntansi yang dibuat perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan.

2. *Asset Missappropriation* (Penyalahgunaan Aset)

Asset Missappropriations atau “pengambilan” aset secara illegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun, dalam istilah hukum, “mengambil” aset secara illegal (tidak sah atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut.

Penyalahgunaan aset biasa dilakukan oleh manejer dan akuntan perusahaan dimana mereka menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kepentingan perusahaan. Moral individu seseorang disini harus

berprilaku baik agar terhindar dari kecurangan akuntansi penyalahgunaan aset. Budaya organisasi penyalahgunaan aset harus diperhitakan/ ditekan agar tidak menajadi budaya perusahaan, dengan ini kecenderungan kecurangan akuntansibisa diminimalisir.

3. *Fraudulent statements* (Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan)

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing (Najaningrum, 2013). Cabang dan ranting yang menggambarkan fraud yang diberi label “*Fraudulent Statements*” dapat dilihat dari sisi kanan *fraud tree*. Jenis *fraud* ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit. Ranting pertama menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan keuangan. *Fraud* ini berupa salah saji (*misstatements* baik *overstatements* maupun *understatements*). Cabang dari ranting ini ada dua. Pertama, menyajikan asset atau pendapatan lebih tinggi dari sebenarnya (*Asset/Revenue overstatements*).

Kedua, menyajikan asset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (*Asset/ Revenue Understatements*). Ranting kedua menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan non-keuangan. *Fraud* ini berupa penyampaian laporan non-keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan keadaan.

Bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan intern maupun ekstern.

Asimetri informasi berhubungan erat dengan pernyataan palsu, dimana hanya manajer dan akuntan perusahaan yang tahu hasil laporan keuangan perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Manajer perusahaan memberikan laporan keuangan palsu kepada auditor agar terhindar dari audit.

2.2.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KAA)

2.2.8.1 Asimetri Informasi

Asimetri informasi merupakan keadaan dimana pihak dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak luar perusahaan (*stakeholder*). Bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan membuat bias atau manipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kompensasi dan reputasi manajemen, serta ratio-ratio keuangan perusahaan.

Perusahaan menyarankan agar bawahan yang memiliki informasi pribadi mengenai perusahaan ikut berpartisipasi sesuai dengan sistem pengendalian manajemen dengan menyampaikan atau menyertakan informasi pribadinya untuk dipadukan dengan standar. Menurut Rahmawati, dkk (2006) dalam Fitriyah (2010) menyebutkan terdapat dua tipe asimetri informasi yaitu:

a. Adverse selection

Adalah jenis asimetri informasi dimana suatu pihak atau lebih yang akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial

memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya untuk mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada investor luar.

b. *Moral hazard*

Adalah jenis asimetri informasi dimana suatu pihak atau lebih melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam menyelesaikan transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik perusahaan besar.

Jadi asimetri informasi situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi.

2.2.8.2 Moralitas Individu

Moralitas individu akan mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi (Wilopo, 2006). Artinya semakin tinggi tahapan moralitas individu (tahapan *post-konvensional*), semakin individu memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan organisasinya semata apalagi kepentingan individunya. Dengan demikian, semakin tinggi moralitas individu, semakin ia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi.

Salah satu teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian etika adalah model Kohlberg. Kohlberg (1969) dalam Prawira, dkk (2014) menjelaskan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu:

Tabel 2.1
Tingkat dan Tahapan Penalaran Moral (Tingkat Tahap/ Stage)

Tingkat	Tahap/ stage
<p><i>1. Pre-conventional</i> Pada level ini individu mengenal moralitas berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, yaitu menyenangkan (hadiah) atau menyakitkan (hukuman). Individu tidak melanggar aturan karena takut akan ancaman hukuman dari otoritas.</p>	<p>1) Orientasi kepatuhan dan Hukuman Pemahaman individu tentang baik dan buruk ditentukan oleh otoritas. Kepatuhan terhadap aturan adalah untuk menghindari hukuman dari otoritas.</p> <p>2) Orientasi hedonistik-instrumental Suatu perbuatan dinilai baik apabila berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan diri.</p>
<p><i>2. Conventional</i> Suatu perbuatan dinilai baik oleh individu apabila mematuhi harapan otoritas atau kelompok sebayanya.</p>	<p>2) Orientasi individu yang baik tindakan berorientasi pada orang lain. Suatu perbuatan dinilai baik apabila menyenangkan bagi orang lain.</p> <p>3) Orientasi keteraturan dan otoritas Perilaku yang dinilai baik adalah menunaikan kewajiban, menghormati otoritas, dan memelihara ketertiban sosial.</p>
<p><i>1. Post-conventional</i> Pada level ini aturan dan institusi dari masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi diperlukan sebagai subjek. Individu menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal.</p>	<p>4) Orientasi kontrol sosial-legalistik Ada semacam perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial. Perbuatan dinilai baik apabila sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>5) Orientasi kata hati Kebenaran ditentukan oleh kata hati, sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal yang bersifat abstrak dan penghormatan terhadap martabat manusia.</p>

Sumber: Kohlberg (1969) dalam Prawira, dkk (2014)

Jadi disimpulkan moralitas individu berkaitan dengan orang lain bukan hanya mengenai kepentingan pribadi, serta moralitas merupakan pemikiran yang objektif dan rasional. Selain itu moralitas merupakan hukum yang universal yang penting.

2.2.8.3 Budaya Etis Organisasi

Budaya etis organisasi memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis terhadap kecurangan akuntansi, karena budaya organisasi merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan akuntansi (Artini dkk, 2014).

Menurut Najahnigrum (2013) komitmen organisasi adalah individu yang memiliki keinginan untuk berbuat etis terhadap organisasinya dengan tujuan agar terciptanya tujuan yang diinginkan tidak lain semata-mata untuk kepentingan organisasi tersebut. Komitmen organisasi juga diartikan, tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan.

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan budaya etis organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu, dengan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi.

2.2.8.4 Ketaatan Terhadap Aturan Akuntansi

Dalam suatu organisasi atau perusahaan terdapat aturan yang menjadi dasar perilaku manajemen yang dibuat untuk mencegah terjadinya aktivitas menyimpang yang dapat merugikan perusahaan. Salah satu aturan dalam suatu perusahaan atau organisasi adalah aturan akuntansi. Aturan akuntansi mengatur

tentang pelaporan keuangan yang berpedoman pada PSAK yang dikeluarkan oleh IAI.

Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan sangat penting bagi investor dan manajemen sehingga harus dapat diandalkan. Sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi. Prinsip akuntansi beraku umum mengacu pada berbagai sumber. Sumber acuan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia menurut IAI (2001:411.2) adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip akuntansi yang ditetapkan dan/atau dinyatakan berlaku oleh badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia.
- b. Pernyataan dari badan, yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan, yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada dan berlaku umum, dengan syarat dalam prosesnya penerbitan tersebut terbuka untuk dikomentari oleh publik dan badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia tidak menyatakan keberatan atas penerbitan pernyataan tersebut.
- c. Pernyataan dari badan, yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan, yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menginterpretasikan atau menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada berlaku umum, atau pernyataan yang tersebut pada butir b yang penerbitannya tidak pernah dinyatakan keberatan dari

badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia tetapi belum pernah secara terbuka dikomentari oleh publik.

- d. Praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui sebagai berlaku umum karena mencerminkan praktik yang lazim dalam industri tertentu, atau penerapan dalam keadaan khusus dari pernyataan yang diakui sebagai berlaku umum, atau penerapan standar akuntansi internasional atau standar akuntansi yang berlaku umum di wilayah lain yang menghasilkan penyajian substansi transaksi secara lebih baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA)

Teori keagenan (Jensen and Meckling, 1976) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah problem yang muncul bila keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan, dan juga disaat prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Bila agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-

masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (pemegang saham). Keinginan, motivasi dan utilitas yang tidak sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham.

Bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lain-lain (Khang, 2002 dalam Wilopo, 2006). Demikian pula, bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan membuat bias atau memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kompensasi dan reputasi manajemen, serta ratio-ratio keuangan perusahaan (Scott, 2003:13 dalam Wilopo, 2006). Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.3.2 Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA)

Moralitas merupakan faktor penting dalam timbulnya kecurangan. Kecenderungan kecurangan akuntansi juga dipengaruhi oleh moralitas orang yang terlibat didalamnya. Kecurangan juga dapat dihindari dengan selalu bersikap terbuka satu sama lain dalam batas-batas kerahasiaan instansi. Jika moralitas terjaga dengan baik, maka kecurangan pun dapat dihindari. Dalam suatu perusahaan atau instansi

moralitas individu sangat berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang mungkin timbul dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhli (2014) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, jadi semakin tinggi moral yang dimiliki belum tentu dapat mengurangi kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) penelitian ini juga berpendapat moralitas individu mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Sehingga didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.3.3 Pengaruh Budaya Etis Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA)

Budaya merupakan nilai-nilai yang dianut dalam suatu kelompok atau organisasi. iklim budaya yang baik akan menciptakan perilaku yang baik pula kepada setiap orang yang berada dalam lingkungan organisasi tersebut. Jika dalam suatu perusahaan terjadi kecurangan, itu merupakan hal yang wajar atau biasa terjadi. Setiap orang dalam perusahaan tersebut akan cenderung melakukan kecurangan karena pegawai tersebut merasionalisasi tindakan tersebut sebagai tindakan yang biasa atau wajar terjadi. Demikian juga sebaliknya, jika dalam suatu instansi telah ditanamkan nilai-nilai bahwa suatu kecurangan merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan banyak pihak, maka pegawai cenderung tidak akan melakukan kecurangan.

Penelitian Najahningrum (2013) menunjukkan bahwa budaya etis organisasiberpengaruh terhadap kecurangan di sektor perusahaan. Dengan demikian, semakin baik iklim budaya etis yang dapat diciptakan dalam lingkungan perusahaan akan meminimalisir kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan pegawai. Hasil tersebut membuat peneliti ingin meneliti tentang budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sehingga didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.3.4 Pengaruh Ketaatan Peraturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA)

Thoyibatun (2009) menjelaskan bahwa Ketaatan Aturan Akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang sudah ditentukan oleh BPK dan/atau SAP, sedangkan Wolk and Tearney (1997:93-95) dalam Wilopo (2006:6) menjelaskan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, di mana hal tersebut akan menimbulkan kecurangan pada instansi yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor.

Dengan demikian suatu instansi atau lembaga akan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku. Begitu sebaliknya jika suatu instansi taatnya terhadap aturan akuntansi yang berlaku maka kecenderungan kecurangan akuntansi dapat berkurang. Taatnya

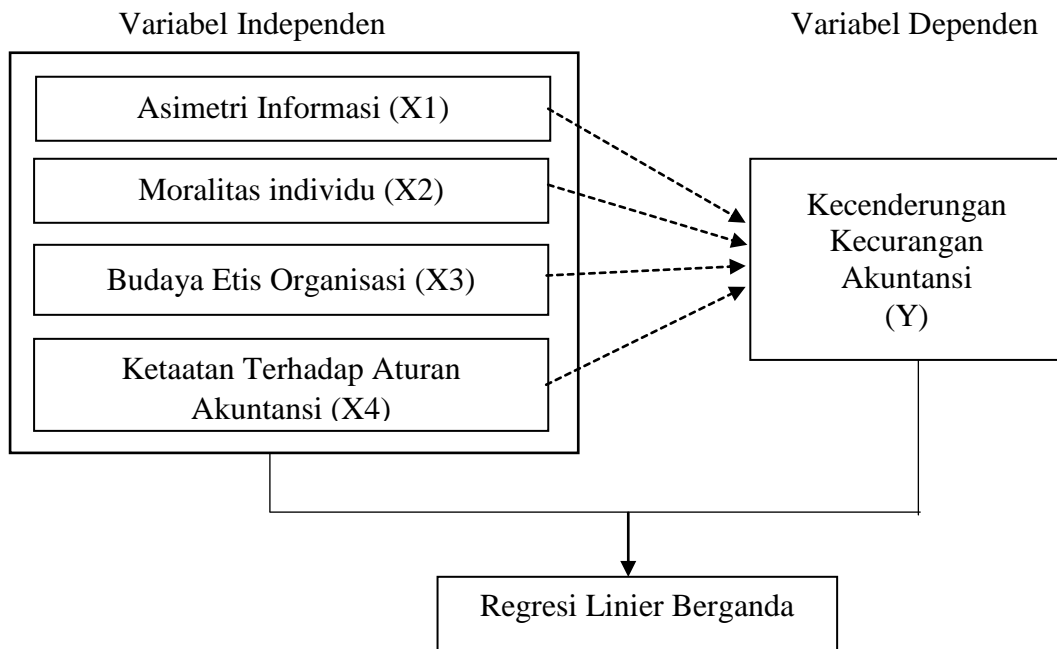
manajemen terhadap aturan akuntansi juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang berhubungan dengan akuntansi dengan baik dan benar sehingga nantinya menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu memberikan informasi yang handal dan akurat untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan berdasarkan penelitian Wilopo (2006), Thoyibatun (2009) dan Adelin (2013) ketaatan aturan akuntansi dapat mencegah dan mengurangi tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti bahwa semakin taat manajemen pada aturan akuntansi maka semakin rendah pula kecenderungan kecurangan akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Ketaatan peraturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini adalah hasil dari pemikiran peneliti setelah mengkaji tentang latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan yang akan dicapai sebagai dasar logika untuk mencari jawaban dari masalah tersebut.



Gambar 2.4
Kerangka Konseptual

Alur Kerangka Konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa faktor asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA), faktor moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA), faktor budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA), faktor ketaatan terhadap aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA), dan faktor asimetri informasi, moralitas individu, budaya etis organisasi, dan ketaatan terhadap aturan akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) yang diukur menggunakan analisis regresi liner berganda.